

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim

- 1) Bagaimana proses perencanaan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang wilayah untuk Kawasan Puncak? Tahun berapa RTRW yang terakhir ditetapkan?
- 2) Apakah dalam penataan ruang wilayah tersebut telah berbasis pada adaptasi perubahan iklim?
- 3) Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak?
- 4) Apa saja yang belum dilakukan (namun sudah direncanakan) Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak?

2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Apakah Pemkab Bogor (cq BPBD) telah mempunyai peta bahaya atau peta risiko bencana:
 - gerakan tanah atau longsor,
 - banjir bandang?untuk Kawasan Puncak, khususnya Kecamatan Cisarua yang terbaru?
- 2) Jika jawabannya “ya, sudah ada”, maka peneliti akan meminta peta rawan bencana longsor dan banjir bandang tersebut.
- 3) Jika jawabannya “belum ada”, maka peneliti akan mohon penjelasan lebih lanjut alasannya.

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim

- 1) Bagaimana koordinasi di Pemkab Bogor dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak? Apakah BPBD dilibatkan dalam perencanaan tata ruang tersebut?
- 2) Jika BPBD dilibatkan, apa peran dan kontribusi BPBD dalam penataan ruang tersebut?
- 3) Apa saja yang menjadi poin penting menurut BPBD kaitannya dengan tata ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak.

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINAS PUPR) KABUPATEN BOGOR

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Dalam penyusunan tata ruang wilayah, apakah ancaman bencana atau bahaya menjadi faktor yang diperhatikan? Apakah Dinas PUPR mempunyai peta risiko bahaya longsor, bahaya banjir bandang, atau peta bahaya lainnya?
- 2) Jika jawaban poin 1) “iya mempunyai”, peneliti akan membandingkan dengan peta risiko bencana dari BPBD (jika ada)
- 3) Bagaimana pemaduan peta risiko bahaya tersebut dalam penyusunan tata ruang wilayah khususnya di Kawasan Puncak?

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim

- 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2016 tentang RTRW Kab Bogor tahun 2016-2036, khususnya di Kawasan Puncak?
- 2) Apakah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini telah terjadi perubahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan?

- 3) Jika jawaban nomor 2) adalah iya, maka dilanjutkan dengan pertanyaan:
 - a). Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan tata ruang awal?
 - b). “bagaimana upaya Pemkab Bogor cq Dinas PUPR dalam menertibkan hal tersebut?

4. DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN BOGOR

Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?

- a. Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Budpar) dalam penataan terhadap tata ruang wilayah bagi pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana;
- b. Bagaimana koordinasi dan kerjasama Dinas Budpar dengan pihak lain (dalam hal ini BPBD dan Dinas PUPR) kaitannya dengan penataan terhadap tata ruang wilayah bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?

5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Bagaimana kondisi lingkungan dan hutan di Kawasan Puncak saat ini, mengingat bahwa Kawasan Puncak adalah penyangga dari DAS Ciliwung?
- 2) Sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah Puncak, khususnya Kecamatan Cisarua?

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?

- 1) Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) dalam menaati tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?

6. DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Upaya Kementerian ATR khususnya Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?

1. Kawasan Puncak menjadi penyangga wilayah ibu kota negara. sehingga Kawasan Puncak adalah salah satu Kawasan yang sangat penting, tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah namun menjadi tanggungjawab Pemerintah pusat juga.
Bagaimana peran dan tanggung jawab Kementerian ATR dalam mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah di Kawasan Puncak?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Kementerian ATR dalam mendukung tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?

7. DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Kawasan Puncak menjadi penyangga wilayah ibu kota negara. sehingga Kawasan Puncak adalah salah satu Kawasan yang sangat penting, tidak hanya menjadi perhatian daerah namun menjadi perhatian wilayah pusat juga.
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh mana perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi kondisi lingkungan di Wilayah Puncak?
 - 2) Apa faktor penyebabnya dan risiko bencana apa yang mungkin timbul akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak tersebut?
 - 3) Apa dampak perubahan iklim terhadap lingkungan di DAS Ciliwung?
- b. Upaya KLHK khususnya Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim*

- 1) Bagaimana peran dan tanggungjawab KLHK dalam mengendalikan penataan ruang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak?
- 2) Upaya apa saja yang dilakukan KLHK dalam mendukung tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?

8. STASIUN KLIMATOLOGI BOGOR

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Bagaimana kondisi perubahan iklim yang terjadi di Kawasan Puncak Bogor, khususnya Wilayah Cisarua?

b. Upaya BMKG dalam mendukung pelaksanaan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim

- 1) Apa saja upaya yang dilakukan Stasiun Klimatologi BMKG dalam mendukung pengurangan risiko bencana, khususnya yang disebabkan oleh perubahan iklim di Kawasan Puncak.

9. STASIUN METEOROLOGI CITEKO, BOGOR

a. Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional

- 1) Sejauh mana pengaruh perubahan iklim yang terjadi di Kawasan Puncak terhadap kondisi cuaca di Kawasan Puncak?

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim

- 1) Bagaimana dengan peta bahaya curah hujan di Kawasan Puncak?
- 2) Apa saja upaya yang dilakukan Stasiun Meteorologi dalam mendukung pengurangan risiko bencana, khususnya kaitannya yang disebabkan oleh perubahan cuaca.

10. KECAMATAN CISARUA

- a. *Tingkat risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak Bogor terhadap keamanan nasional*
- 1) Desa mana saja yang rawan terhadap tanah longsor dan rawan banjir bandang?
 - 2) Dalam 10 tahun terakhir ini, berapa banyak terjadi longsor dan banjir bandang ?
 - 3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut?
- b. *Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?*
- 1) Apa saja yang dilakukan Kecamatan Cisarua dan pemerintah daerah dalam menjaga tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?
 - 2) Bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat penduduk lokal ataupun pendatang untuk mendukung program penataan ruang wilayah Kawasan Puncak tersebut?

LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK

Nama informan : Bapak Endri Setiana
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor
Jabatan : Perencana
Tanggal Wawancara : 27 September 2021 dan 15 November 2021
Waktu : 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Ruang Perencanaan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses perencanaan Pemerintah Daerah dalam penataan ruang wilayah untuk Kawasan Puncak? Tahun berapa RTRW yang terakhir ditetapkan?	Proses perencanaan pemerintah daerah dalam penataan ruang wilayah secara umum termasuk Kawasan Puncak yaitu dengan melibatkan instansi terkait. Selain Bappeda litbang dan Dinas PUPR, melibatkan pula dinas atau instansi lain seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas LH, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lain sebagainya. RTRW yang terakhir ditetapkan oleh Kabupaten Bogor adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan setiap tahunnya terdapat pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh dinas atau instansi pelaksana.
2	Apakah dalam penataan ruang wilayah tersebut telah berbasis pada adaptasi risiko bencana akibat perubahan iklim?	Perubahan iklim yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bogor berkaitan curah hujan. Hal ini berkaitan dengan bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Dalam penataan ruang wilayah melibatkan beberapa instansi terkait misal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3	Apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak?	Hal-hal yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya dalam penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak diantaranya yaitu menyusun Peraturan Daerah kaitannya dengan RTRW serta evaluasi dan tindak lanjut. Dalam penyusunannya dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bogor termasuk Kawasan Puncak.

Nama informan : Bapak R. Damara Adi N.
 Dandi Savero Firdaus
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Bogor
Jabatan : Analis Mitigasi Bencana
Tanggal Wawancara : 14 Oktober 2021
Waktu : 10.15 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Bidang Pencegahan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Pemkab Bogor (cq BPBD) telah mempunyai peta bahaya atau peta risiko bencana gerakan tanah atau longsor dan banjir bandang? (untuk Kawasan Puncak, khususnya yang masuk wilayah Kabupaten Bogor).	Kabupaten Bogor memiliki peta rawan bencana, meskipun demikian peta yang ada adalah dengan skala 1:140.000 sehingga informasi yang terlihat tidak secara detail.
2	Apakah peneliti dapat meminta peta rawan bencana longsor dan banjir bandang tersebut?	Iya bisa, nanti kami berikan
3	Bagaimana koordinasi di Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak? Apakah BPBD dilibatkan dalam perencanaan tata ruang tersebut?	Penataan ruang di wilayah Kabupaten Bogor tercantum dalam Peraturan Daerah yang mana saat penyusunan beberapa instansi terkait, termasuk BPBD dilibatkan. Sehingga informasi-informasi dari BPBD dapat terakomodir dan diaplikasikan dalam penyusunan RTRW tersebut.
4	Jika BPBD dilibatkan, apa peran dan kontribusi BPBD dalam penataan ruang tersebut?	BPBD terlibat dalam penyusunan dan evaluasi tata ruang wilayah, dalam hal ini sebagai instansi pendukung. <i>Leading sektor</i> dalam hal ini adalah Bappeda Litbang dibantu oleh Dinas PUPR
5	Apa saja yang menjadi poin penting menurut BPBD kaitannya dengan tata ruang wilayah yang berbasis risiko bencana untuk Kawasan Puncak.	Harus ada koordinasi lintas sektor, selain itu adanya peta rawan bencana dengan skala sesuai kebutuhan sangat diperlukan. Selain itu, adanya pengurangan risiko bencana yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah pun menjadi poin penting dalam pelaksanaan tata ruang berbasis risiko bencana

Nama informan : Wawan Darmawan SP. M.Si, Erik Mohamar, ST. Priyo Widodo,SE.
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jabatan : Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Wawan) Kasi Perencanaan Ruang (Erik M.) Staf Pelaksana (Priyo W.)
Tanggal Wawancara : 27 September 2021 dan 27 Oktober 2021
Waktu : 13.30 – 14.30 dan 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Bidang Penataan Ruang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam penyusunan tata ruang wilayah, apakah ancaman bencana atau bahaya menjadi faktor yang diperhatikan? Apakah Dinas PUPR mempunyai peta risiko bahaya longsor, bahaya banjir bandang, atau peta bahaya lainnya?	Ya betul sekali. Dalam penyusunan tata ruang wilayah, salah satu yang diperhatikan adalah faktor ancaman bencana ataupun bahaya. Sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah banyak melibatkan instansi terkait dengan leading sector Bappeda Litbang. Perihal peta rawa bencana di BPBD lebih lengkap, sehingga bisa menghubungi lebih lanjut ke BPBD.
2	Bagaimana pepaduan peta risiko bahaya tersebut dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah khususnya di Kawasan Puncak?	Dalam penyusunan perencanaan tata ruang wilayah, peta risiko bencana bahaya menjadi salah satu bahan pendukung termasuk di Kawasan Puncak. Sehingga risiko-risiko bahaya seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor dapat diminimalisir termasuk di Kawasan Puncak.
3	Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2016, khususnya di Kawasan Puncak?	Pelaksanaan Perda tersebut selalu mendapatkan pengawasan khususnya dari pihak-pihak terkait. Dan berkaitan dengan bencana longsor dan banjir, berikut upaya-upaya yang telah dilaksanakan di Kawasan Puncak khususnya yang masuk di Kabupaten Bogor. Pengendalian terhadap bencana banjir salah satunya beberapa waktu lalu terdapat program Hutan rakyat, meliputi: - Rehabilitasi lahan kritis. Kegiatannya diantaranya pembangunan sumur resapan, untuk pengendali laju air agar air tidak langsung masuk ke sungai sehingga membanjiri wilayah di bawahnya namun air bisa terserap ke tanah dan sebagian dimanfaatkan untuk sumur-sumur di wilayah tersebut sehingga saat kemarau bisa dimanfaatkan juga sebagai cadangan air.

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan galih plah (sungai kecil) <p>Pengendalian terhadap bencana longsor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program penanaman tanaman kombinasi antara tanaman tahunan berupa tanaman kayu dan tanaman buah. Tanaman kayu biasanya 5 tahunan dan kayunya dapat dipanen serta dijual, begitu pula juga tanaman buah hasil buahnya dapat dijual. Kegiatan ini selain untuk pengendalian bencana longsor, juga dapat menarik minat kelompok tani. - Pemasangan bronjong di kanan kiri sungai.
4	Apakah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini telah terjadi perubahan dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan?	Sejauh ini pelaksanaan tata ruang wilayah sangat diusahakan untuk sesuai dengan perencanaan. Meskipun dalam perjalanan ada beberapa pelanggaran.
5	Jika jawaban nomor 2) adalah iya, maka dilanjutkan dengan pertanyaan: a). Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan atau ketidaksesuaian dengan perencanaan tata ruang awal? b). "bagaimana upaya Pemkab Bogor cq Dinas PUPR dalam menertibkan hal tersebut?	<p>Tipologi pelanggaran yang ada diantaranya adalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung dimanfaatkan untuk penginapan ataupun hotel. - Bangunan-bangunan yang dibangun di tanah milik negara - Pembangunan yang kurang sesuai dengan rencana tata ruang. - Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai dengan izin tata ruang. Misal ketentuan harusnya ada garis sempadan 15 % tapi dilaksanakan hanya 10%, seharusnya ada sumur resapan tapi tidak dibuat. Sehingga resapan air berkurang. <p>Pelanggaran-pelanggaran yang ada maka ditindaklanjuti dengan memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Jika teguran tersebut ditindaklanjuti dan sesuai dengan arahan dan aturan maka kasus tersebut selesai. Namun jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti maka sanksi lbh keras diberikan kepada pemilik lahan ataupun bangunan.</p> <p>Pengawasan perihal perizinan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.</p>

		<p>Kementerian ATR beberapa waktu lalu mengadakan kegiatan pengendalian DAS Ciliwung dan DAS Cisadane khususnya terkait dengan garis sepadan.</p> <p>Selain itu, bendungan juga berperan sangat penting sebagai dalam mengatur air yang mengalir.</p>
6		<p>Pelaksanaan pembangunan diawasi secara ketat yaitu diantaranya melalui perizinan. Contoh dalam pembangunan gedung harus ada perizinan yang harus dipenuhi baik dari sisi izin lokasi, peruntukan penggunaan tanah, mendirikan bangunan, analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan lain sebagainya.</p>

Nama informan : Tenny Ramdhani
Instansi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Bogor
Jabatan : Kepala Bidang Destinasi
Tanggal Wawancara : 11 Oktober 2021
Waktu : Pukul 10.00 - 11.30 WIB
Tempat : Ruang Bidang Destinasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Budpar) dalam penataan terhadap tata ruang wilayah bagi pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana.	Kabupaten Bogor memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025 yang mengatur kepariwisataan, termasuk di Kawasan Puncak yang masuk wilayah Kabupaten Bogor. Kaitannya dengan tata ruang, Dinas PUPR dan Bappeda lebih berperan. Dinas Budpar pun selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk PUPR jika ada kaitannya dengan tata ruang.
2	Bagaimana koordinasi dan kerjasama Dinas Budpar dengan pihak lain (dalam hal ini BPBD dan Dinas PUPR) kaitannya dengan penataan terhadap tata ruang wilayah bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?	Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Bappeda Litbang beserta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun ikut dilibatkan dalam rapat-rapat koordinasi. Apalagi kaitannya dengan wilayah Kawasan Puncak yang banyak area wisata.
3	Bagaimana perencanaan tata ruang terkait dengan kepariwisataan?	Perda Nomor 7 Rencana Induk Kepariwisata Daerah. Tidak hanya sebagai pedoman ruang investasi tapi sebagai peluang masyarakat dan pengusaha . penetapan kawasan ada 7, dan terbagi 2 yaitu kawasan strategi daerah dan strategi prioritas. Fokus pembangunan Kawasan Strategis Daerah (Puncak – Lido), KSPD Gunung Salak Indah, KSPD Cibinong – Sentul. Puncak masuk Kawasan Strategis Puncak Lido ada 8 kecamatan meliputi Cisarua, Ciawi, Megamendung, Caringin, Cigombong, Taman Sari, Ciomas, Cijeruk.

		<p>Penetapan kawasan atas dasar Perda tata ruang wilayah Bogor.</p> <p>Tahun 2021 sedang menyusun <i>master plan</i> Puncak – Lido - Sukamakmur dan Caringin. Mitigasi ada di masterplan tersebut. Sudah tahap-tahapan termasuk diskusi dengan instansi terkait seperti Bappeda Litbang, PUPR, DPKPP, BPBD, dll.</p> <p>Kawasan wisata di kawasan puncak tidak hanya ranah kabupaten daerah masuk wilayah PTPN, Perhutani, dan Taman Nasional. Puncak adalah lahan hijau yang mana 30 % tanah yg dimiliki untuk bangunan dan selebihnya harus daerah resapan hijau. Problem yg adalah terkait perizinan. Tidak semua tempat wisata mempunyai izin karena memang tidak bisa diberikan izin. Contoh di lapangan ditemui mereka membuka wisata terlebih dahulu baru selanjutnya mengurus perizinan dan ternyata izin tidak bisa keluar karena tidak sesuai dengan tata ruang. Jika ada kondisi seperti ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak diskusi pemilik usaha tersebut dan memberikan edukasi.</p>
--	--	---

Nama informan : Mohammad Haris, S.Sos
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Jabatan : Kasi Pemeliharaan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Tanggal Wawancara : 12 Oktober 2021 Pukul 11.30
Waktu : 12.30 – 13.30 WIB
Tempat : Ruang Tata Lingkungan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi lingkungan dan hutan di Kawasan Puncak saat ini, mengingat bahwa Kawasan Puncak adalah penyangga dari DAS Ciliwung?	Pembangunan di Kawasan Puncak selalu ada, bahkan termasuk bangunan liar. Dalam pembangunan pasti ada yang dikorbankan, salah satunya yaitu fungsi serapan pada area yang tertutup dengan semen bahkan beton. Tentu dengan semakin luasnya area yang tertutup oleh semen ataupun beton tentunya akan mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan. Hal ini salah satu penyebab Kawasan Puncak berisiko terhadap longsor maupun banjir bandang.
	Sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan akibat pelanggaran atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di wilayah Puncak, khususnya Kecamatan Cisarua?	Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang masif di Kawasan Puncak memang ada, namun tidak didata secara detail dan belum dibuat dalam bentuk laporan. Dari Dinas LH sendiri berusaha untuk tetap menjaga Kawasan Puncak sebagai fungsi awal yaitu daerah serapan, dan mengurangi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi.
	Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) dalam menaati tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?	Upaya yang dilakukan oleh Dinas LH salah satunya adalah ikut terlibat bersama instansi terkait lainnya pada saat penyusunan RTRW Kabupaten yang dilakukan oleh Bappeda Litbanga dan Dinas PUPR . Selain itu, Dinas LH ada program penanaman pohon keras untuk wilayah-wilayah tertentu setiap tahunnya. Kawasan Puncak pernah menjadi wilayah target penanaman pohon keras, diantaranya yang ditanam adalah pohon sengon, trembesi dan jabon.

Nama informan : Ilham Kesuma
Instansi : Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Jabatan : Penata Ruang Muda
Tanggal Wawancara : 25 Oktober 2021 dan 12 November 2021
Waktu : 11.00 – 12.00
Tempat : Online dan Offline di Ruang SubDit Pengendalian
 Pemanfaatan Ruang

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Kawasan Puncak menjadi penyangga wilayah ibu kota negara. sehingga Kawasan Puncak adalah salah satu Kawasan yang sangat penting, tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah namun menjadi tanggungjawab Pemerintah pusat juga. Bagaimana peran dan tanggung jawab Kementerian ATR dalam mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah di Kawasan Puncak?</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, dan regional yang terintegrasi dengan kawasan lainnya berbasis daya dukung lingkungan. Pengembangan berbasis daya dukung lingkungan menjadi fokus utama pengendalian pemanfaatan ruang mengingat Kawasan Puncak merupakan hulu bagi beberapa Daerah Aliran Sungai di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, sekaligus sebagai kawasan penyangga kegiatan di ibu kota negara.</p> <p>Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b bahwa dibutuhkan pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan Inti untuk membatasi penjararan pertumbuhan ke kawasan sekitarnya, hal ini diperlukan karena Kawasan Puncak juga memiliki fungsi sebagai DTA. DTA ini sendiri memiliki peran vital untuk menjaga ketersediaan air dalam tanah sekaligus menjaga keberlanjutan ekologis. 3 Dalam Pasal 135 Ayat (3) dijelaskan tugas pokok dan kewenangan dalam pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur, meliputi: a. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sesuai dengan kewenangannya; dan b. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sesuai dengan kewenangannya</p>
2	<p>Upaya apa saja yang dilakukan Kementerian ATR dalam mendukung tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana?</p>	<p>Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang meliputi dua pokok kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bersifat melakukan tindakan pencegahan sebelum pelanggaran pemanfaatan ruang terjadi melalui pemantauan dan evaluasi pemanfaatan rencana tata ruang; dan

		<p>- Penertiban Pemanfaatan Ruang, bersifat pada proses penindakan atau penegakan hukum ketika sudah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang dan kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p>Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur antara lain:</p> <p>a. Tahun 2018 dilakukan fasilitasi penertiban melalui audit tata ruang Kawasan Puncak, kegiatan ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi lokasi yang terindikasi melanggar karena pemanfaatan ruang eksisting tidak sesuai dengan peta pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Output kegiatan yaitu 4 pengenaan sanksi administrasi berupa pemasangan papan peringatan melanggar pemanfaatan ruang pada bangunan yang melanggar serta peringatan tertulis.</p> <p>b. Tahun 2019 dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Puncak (Kabupaten Bogor dan kabupaten Cianjur), kegiatan ini diselenggarakan untuk mengidentifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang serta dengan rencana tata ruang kesesuaian hak atas tanah dengan ketentuan peruntukan ruangnya. Output kegiatan berupa konsep pemberian insentif dan disinsentif pada bangunanbangunan yang terindikasi melanggar ketentuan pemanfaatan ruang.</p> <p>c. Tahun 2020 dilakukan kegiatan lanjutan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Puncak dengan fokus lokasi di Kecamatan Cisarua, kegiatan ini merupakan aksi dari hasil identifikasi yang dilakukan Tahun 2019 berupa pemberian disinsentif kepada bangunanbangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Disinsentif yang diberikan berupa penanaman pohon serta pembuatan sumur resapan dalam rangka menjaga kualitas ekologis kawasan.</p>
3	Apakah terdapat data pelanggaran-pelanggaran yang ada di Puncak? Dan apakah kami bisa mendapatkan datanya?	Kerusakan lahan dan pelanggaran-pelanggaran kami tidak dapat mengeluarkan karena ada pihak lain terkait, jadi untuk data intern. Untuk data detailnya nanti bisa dilihat di channel Youtube Kementerian ATR/BPN kebetulan kemarin baru saja mengadakan acara di Puncak yaitu acara Hantaru, Pesan Puncak sekaligus acara penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan. Nah kerusakan dan data publikasi lainnya disampaikan pada acara tersebut.

Nama informan : Kardono, S.Hut, M.T., MMG.,
Dian Ariestyowati, S.Hut., M.Sc.,
Yadi Suryadi, S.Hut., M.Link.

Instansi : Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Jabatan : Kasi Analisis Ekologi Alami (Bapak Kardono),
Kasi Analisis Ekologi Buatan (Ibu Dian) A.,
Analisis Data (Bapak Yadi S.)

Tanggal Wawancara : 12 November 2021

Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kawasan Puncak menjadi penyangga wilayah ibu kota negara, sehingga Kawasan Puncak adalah salah satu Kawasan yang sangat penting, tidak hanya menjadi perhatian daerah namun menjadi perhatian wilayah pusat juga. Menurut PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh mana perubahan iklim yang terjadi di Wilayah Puncak dan bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap kondisi lingkungan?	Proyeksi perubahan iklim dilihat melalui data 30 tahun terakhir, yang mana data dilihat per 10 tahun terakhir. Perubahan iklim yang terjadi dapat berpengaruh terhadap bencana hidrometeorologi.
2	Apa saja faktor penyebab dan risiko bencana apa yang mungkin timbul akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak tersebut?	Faktor penyebab terjadinya bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak diantaranya adalah aktivitas manusia dan gas emisi yang naik ke atas. Menghadapi perubahan iklim harus semua pihak dan semua Kementerian/Lembaga. Bumi bisa ditinggali karena secara ilmiah suhu bumi sesuai dengan manusia untuk hidup. Di sisi lain kegiatan industri di abad ke-18 meningkatkan bahan bakar fosil dan meningkatkan emisi sehingga kenaikan suhu terjadi. Jika kenaikan emisi tidak ditekan maka akan berbahaya bagi manusia. Menurut Paris Agreement kenaikan suhu tidak boleh lebih dari 2°C per tahun, dan bahkan menurut ahli justru tidak boleh lebih dari > 1,5 °C. Penggunaan AC, batu bara, peternakan dan lainnya dapat meningkatkan emisi. Menghadapi emisi maka adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan. Pembangunan mengakibatkan

		perubahan iklim yaitu adanya tekanan yang semakin meningkat. Untuk wilayah Puncak → pengelolaan hulu sangat diperlukan, pengelolaan pembangunan, dan resapan.
3	Bagaimana peran dan tanggungjawab KLHK dalam mengendalikan penataan ruang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim di Kawasan Puncak?	KLHK menyusun regulasi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang mana diantaranya berisi tentang kewajiban menyusun kajian lingkungan hidup strategis dalam setiap pembangunan. Dan Setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun RPPLH.
4	Upaya apa saja yang dilakukan KLHK dalam mendukung tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> - KLHK mengeluarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang rencana pengelolaan lingkungan (RPPLH) → kewajiban Menyusun kajian lingkungan hidup strategis → Setiap kementerian / lembaga menyusun RPPLH - RPPLH ada muatan-muatan yang harus ada dalam dokumen tersebut, diantaranya adaptasi dan mitigasi juga, Daya dukung dan daya tampung, baku mutu lingkungan , UKL, UPL. Hal tersebut untuk menjaga keberlanjutan pelestarian pemanfaatan.

Nama informan : Ibu Rara
Instansi : Stasiun Klimatologi Bogor
Jabatan : Petugas Pelayanan
Tanggal Wawancara : 22 September 2021
Waktu : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : via online (WhatsApp dan Email)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi perubahan iklim yang terjadi di Kawasan Puncak Bogor, khususnya Wilayah Cisarua?	Perubahan iklim yang terjadi bisa dilihat dari hasil data yang akan kami berikan.
2	<p><i>Upaya BMKG dalam mendukung pelaksanaan tata ruang wilayah di Kawasan Puncak Bogor yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim</i></p> <p>Apa saja upaya yang dilakukan Stasiun Klimatologi dalam mendukung pengurangan risiko bencana, khususnya yang disebabkan oleh perubahan iklim di Kawasan Puncak?</p>	<p>Stasiun Klimatologi Bogor berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya memberikan informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara dan Geofisika (MKKuG), dan memberi peringatan dini cuaca ke instansi terkait. Peringatan dini dilakukan melalui grup WhatsApp dengan instansi terkait seperti BPBD, serta melalui aplikasi InfoBMKG. Selain itu, Stasiun Klimatologi Bogor juga mengundang instansi terkait jika ada rilis info prakiraan awal musim atau berkirim surat ke Pemerintah Daerah, BPBD, dan instansi lain terkait jika ada perkembangan cuaca dan iklim yang signifikan.</p>

Nama informan : Fatuhri Syabani
Instansi : Stasiun Meteorologi Citeko Bogor
Jabatan : dengan Kepala Stasiun Meteorologi Citeko Bogor
Tanggal Wawancara : 2 September 2021
Waktu : 10.30 – 11.30
Tempat : Ruang Pelayanan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejauh mana pengaruh perubahan iklim yang terjadi di Kawasan Puncak terhadap kondisi cuaca di Kawasan Puncak?	Untuk pengamatan iklim dilakukan oleh Stasiun Klimatologi, sehingga detail data unsur iklim dan pengaruhnya ada di Stasiun Klimatologi.
2	Apakah terdapat peta bahaya curah hujan di Kawasan Puncak?	Stasiun Meteorologi Citeko adalah stasiun kelas III sehingga hanya menyiapkan data saja. Peta bahaya di sini tidak ada, biasanya ada di BPBD.
3	Apa saja upaya yang dilakukan Stasiun Meteorologi dalam mendukung pengurangan risiko bencana, khususnya kaitannya yang disebabkan oleh perubahan cuaca.	Stasiun Meteorologi Citeko memberikan peringatan dini kepada instansi terkait melalui pesan grup WhatsApp yang mana di grup tersebut terdapat instansi terkait seperti BPBD. Peringatan dini tersebut meliputi hasil pantauan kondisi curah hujan, angin, dan petir. Hasil pantauan baik secara kasat mata maupun dari alat. Wilayah kerja Stasiun Meteorologi Citeko adalah Kawasan Puncak meliputi Cipanas sampai dengan Ciawi, untuk peringatan dini Wilayah Bogor secara umum dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Bogor.

Nama informan : M. Effendi, S.A.P.
Instansi : Kecamatan Cisarua
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Tanggal Wawancara : 28 September 2021
Waktu : Pukul 09.00 – 11.30 WIB
Tempat : Kantor Kecamatan Cisarua

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Desa mana saja yang rawan terhadap tanah longsor dan rawan banjir bandang?	Wilayah Cisarua yang rawan terhadap bencana tanah longsor dan banjir bandang adalah wilayah Cisarua bagian atas yaitu Desa Tugu baik Tugu Utara maupun Tugu Selatan.
2	Dalam 10 tahun terakhir ini, berapa banyak terjadi longsor dan banjir bandang?	Kejadian tanah longsor ataupun banjir bandang hampir setiap tahun terjadi. Namun demikian tidak untuk jumlah pastinya tidak tercatat dengan baik
3	Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut?	Dampak dari banjir bandang dan tanah longsor dirasakan langsung terhadap warga baik korban luka-luka, kerusakan rumah, lahan dan lingkungan. Hal tersebut juga mempengaruhi akses warga ke beberapa titik dan hal ini juga menghambat laju perekonomian warga dan kegiatan lainnya sementara waktu.
4	Apa saja yang dilakukan Kecamatan Cisarua dan pemerintah daerah dalam menjaga tata ruang wilayah di Kawasan Puncak yang berbasis risiko bencana akibat perubahan iklim?	Wilayah Puncak, salah satunya Cisarua tidak hanya menjadi urusan pemerintah kecamatan namun menjadi perhatian pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat. Untuk penataan ruang diatur oleh tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat kecamatan Sedangkan pemerintah kecamatan bersifat pengawasan bersama UPT. Untuk wilayah Cisarua ata khususnya Tugu Utara dan Selatan pembangunan memang dikurangi tidak seramai dan sepadat di Cisarua bawah. Jika ada pelanggaran maka penindakan dilakukan mulai dari teguran sampai dengan peringatan dan paling berat sampai ke ranah hukum. Penindakan tersebut tidak hanya dari Kecamatan yang turun, namun dari pihak pemerintah daerah pun ikut turun diantaranya Dinas PUPR.
5	Bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat penduduk lokal ataupun pendatang untuk mendukung program penataan ruang wilayah Kawasan Puncak tersebut?	Pembangunan di Wilayah Cisarua tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal namun banyak pula oleh para investor. Untuk sosialisasi kepada masyarakat biasanya saat mengurus izin mendirikan bangunan dari Dinas-dinas terkait telah memberikan informasi.

Nama informan : Sugiyanto
Instansi : Desa Tugu Selatan
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Tugu Selatan
Tanggal Wawancara : 07 Oktober 2021
Waktu : Pukul 101.00 – 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Tugu Selatan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan terakhir wilayah Tugu Selatan mengalami bencana longsor ataupun banjir bandang?	Terakhir terjadi bencana tanah longsor yaitu awal tahun 2021, di area Gunung Mas. Untuk tindak lanjutnya baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan PTPN karena area Gunung Mas merupakan tanah milik PTPN.
2	Bagaimana kejadian longsor tersebut?	Di wilayah Tugu Selatan bagian atas terdapat titik pertemuan 3 sungai yang mana pada saat itu hujan juga deras sehingga air pun tak terbandung menyebabkan tanah longsor di area Gunung Mas. Aliran sungai ini pun mengalir ke Desa Tugu Utara dan masuk ke aliran sungai Ciliwung.
3	Bagaimana penanganan bencana di Desa Tugu Selatan?	Di Desa terdapat Sukarelawan Tanggap Bencana Desa (SPBD) untuk menanggulangi bencana dan peningkatan kapasitas sukarelawan ini biasanya dari Tagana Kecamatan dan Kabupaten.
4	Bagaimana pengawasan desa terhadap pembangunan di yang sesuai tata ruang yang sudah direncanakan?	Terkait pengawasan pembangunan di wilayah Tugu Selatan sudah ada aturan yang ditentukan BKPP. Lahan hijau yaitu lahan yang tidak bisa dibangun. Daerah kampung Sampai, Karamat, Bojong. Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan penataan Kawasan Puncak, salah satunya karena kemacetan. Beberapa titik wilayah puncak tidak boleh ada pembangunan, kalo pun ada pembangunan liar akan direlokasi ke <i>rest area</i> Gunung Mas. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan PTPN dan akan diserahkan kepada Pemerintah
5	Bagaimana dengan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi?	Penindakan oleh Satpol PP Kabupaten dan bekerjasama dengan satpol PP Kecamatan. Untuk laporan biasanya dari PTPN ke pihak desa dan desa menindaklanjuti ke Kecamatan dan berlanjut ke Kabupaten. Karena wilayah yang biasa dibangun secara liar yang di pinggir jalan adalah tanah milik PTPN. Selama ini pembangunan di wilayah Puncak sedang diperbaiki, ada jalur yang harus ditempuh untuk mendirikan bangunan baik ke kecamatan, maupun DPKPP. Ada lahan hijau yang tidak boleh

		<p>dibangun khususnya di Tugu Selatan khususnya kampung Sampai, Karamat dan Bojong Kawu.</p> <p>Pembangunan tempat wisata di Tugu Selatan mulai berkurang. Jalur puncak sedang ditata oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dan salah satunya dengan pensterilan beberapa titik tidak boleh ada pembangunan.</p> <p>Tanah yang g-pinggir jalan adalah daerah milik PTPN sehingga jika ada pedagang liar maka rata-rata adalah laporan dari PTPN. PTPN lapor ke desa. Pihak desa memfasilitasi ke kecamatan dan nanti Satpol PP bersurat dulu kepada pihak yang dilaporkan, jika bandel baru ditindak. PTPN pun kasih kompensasi dari PTPN meskipun tidak banyak buat yang ditindak sebagai ganti rugi. Saat pembongkaran tetep didampingi pihak desa.</p>
6	Apakah Desa Tugu Selatan mempunyai sukarelawan bencana?	Desa di Tugu Selatan mempunyai Sukarelawan Tanggap Bencana dan di kecamatan ada call center tanggap bencana.
7	Bagaimana penanganan saat longsor	Bencana longsor gunung mas bisa ditangani sendiri. Daerah gunung mas adalah masuk area PTPN dan warga Gunung Mas sebagian besar pegawai PTPN. Dari pihak luar pun banyak yang kasih bantuan karena memang wilayah Cisarua dikenal dimana-mana. Banyak sukarelawan datang memberikan donasi dan bantuan lainnya.
8	<p>Bagaimana kejadian banjir bandang yang terjadi awal tahun ini?</p> <p>Dan apakah ada korban</p>	<p>Banjir bandang yang terjadi di Kawasan Cisarua awal tahun 2021 salah satu penyebabnya adalah karena hujan deras dan air mengalir deras di titik pertemuan 3 anak sungai kecil di Desa Tugu Selatan.</p> <p>Korban jiwa sebenarnya ada, cuma dia bukan karena banjir bandangnya tapi karena kaget dan terjatuh. Untuk kerusakan rumah ada beberapa.</p>

LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN

Dokumentasi Wawancara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bogor



Dokumentasi Wawancara di BPBD Kabupaten Bogor



Dokumentasi Wawancara di Dinas PUPR Kabupaten Bogor



**Dokumentasi Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bogor**



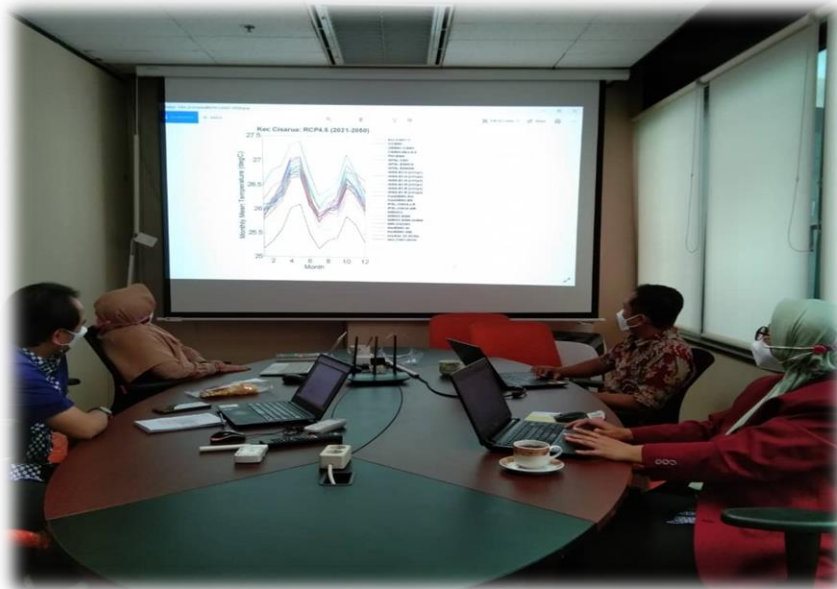
**Dokumentasi Wawancara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bogor**



**Dokumentasi Wawancara di Stasiun Meteorologi Citeko
dan Stasiun Klimatologi Bogor**



**Dokumentasi Wawancara di Direktorat Jenderal Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**



**Dokumentasi Wawancara di Direktorat Jenderal Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI**



**Dokumentasi Wawancara di Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor**



**Dokumentasi Wawancara di Desa Tugu Utara dan Selatan,
Kecamatan Cisarua , Kabupaten Bogor**





LAMPIRAN 4. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
 Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/78/VIII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan izin penelitian dan
 Permintaan Data

Bogor, 25 Agustus 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
 di
 Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Unhan TA. 2021.
 - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI atas nama Mir'atul Azizah NIM: 120200301015, Nomor HP: 081910003030, email: miratul.azizah.s@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Penataan Ruang dan Wilayah Berbasis Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim di Kawasan Puncak Bogor".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Republik Indonesia
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunaser, S.Sos., MM., C.Fr.A
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI
7. Bupati Bogor.

Lampiran Surat Rektor Unhan RI
Nomor : B / 78 / VIII / 2021
Tanggal : 25 Agustus 2021

DAFTAR PEJABAT YANG DIWAWANCARA

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor
3. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bogor
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor
6. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Direktur Jendral Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Kepala Stasiun Klimatologi, Bogor
9. Kepala Stasiun Meterologi Citeko, Bogor
10. Kolonel Laut (K) Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep
11. Camat Cisarua, Bogor

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Dr. Syamsunaser, S.Sos., MM., C.Fr.A
Marsekal Muda TNI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914 Telp/Fax. (021) 8758836

Nomor : 070 / 1513 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Cibinong, 8 September 2021

Kepada
Yth. Daftar Terlampir

Di
Tempat

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :

Surat Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia , Nomor : B/78/VIII/2021. Tanggal 25 Agustus 2021, Perihal Permohonan Izin Penelitiandan Permintaan Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : Mir'atul Azizah
Alamat : Perumahan Rancamaya Blok B.11 No 11 Rt 003 Rw 002 Desa Ciherang Pondok Kec. Caringin
Judul Penelitian : Penataan Ruang dan Wilayah Berbasis Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim di Kawasan Puncak Bogor
Penanggung Jawab : Dr. Syamsunansir, S.Sos., MM., C.Fr.A
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 13 September 2021 s.d 13 Oktober 2021
Tempat : Daftar Terlampir

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

1. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
2. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat;
3. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
4. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
5. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



A.N KEPALA
KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK,
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
ASEP NURDIN, S.SOS., MA
BOGOR PEMBINA
NIP. 196711101991021006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Daftar Lampiran Surat

No : 070/1513. Bakesbangpol
Tanggal : 8 September 2021

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor
3. Kabupaten Bogor
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor
8. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
9. Direktur Jendral Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Kepala Stasiun Klimatologi, Bogor
11. Kepala Stasiun Meteorologi Citeko, Bogor
12. Kolonel Laut (K) Dr. Anwar Kurniadi, S.Kp., M.Kep.
13. Camat Cisarua, Kabupaten Bogor

RIWAYAT HIDUP



Peneliti mempunyai nama lengkap Mir'atul Azizah dan biasa disapa Izzah, lahir di Tegal - Jawa Tengah tanggal 31 Juli 1984. Peneliti saat ini tinggal di Bogor – Jawa Barat bersama keluarga tercinta. Peneliti adalah seorang Aparatur Sipil Negara Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido - Bogor sejak tahun 2008.

Alhamdulillah peneliti berkesempatan melanjutkan studi S2 di Universitas Pertahanan RI Program Studi Manajemen Bencana melalui beasiswa di tahun 2020. Pelatihan dan seminar kebencanaan yang pernah diikuti peneliti diantaranya adalah Pelatihan Dasar Manajemen Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *International Workshop on Big Data and Information Security*, Pelatihan *Google Earth Engine*, Pelatihan Pembuatan Peta Bencana. Peneliti juga belajar banyak tentang kebencanaan dari para pakar baik dalam maupun luar negeri, diantaranya dari BNPB, Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Universitas Syiah Kuala Aceh dan beberapa lembaga dari Aceh. Pakar kebencanaan dari Jepang seperti dari Tohoku University, Nagoya University, Kobe University serta *International Center for Water Hazard and Risk Management (ICHARM)*, *National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED)*. Peneliti juga pernah mengikuti Bimbingan Teknis Sukses Publikasi Jurnal Ilmiah, *Publishing in Top SSCI Journals and Get Recognition for Your Research* by Emerald Publishing serta mempresentasikan hasil penelitiannya “*The Covid-19 in the Perspective of National Security*” pada acara *The International Conference on Disaster Mitigation and Management (ICDMM) 2021* dan dipublikasikan di *ES3 Web of Conferences*. Motto hidup penulis “Kita punya Allah yang Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Sempurna”. E-mail peneliti: miratul.azizah.sumitro@gmail.com.